

24 Juli 2015

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 12

Momentum Muktamar

ENTAH disengaja atau tidak, dua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) akan menyelenggarakan muktamar secara bersamaan. Muhammadiyah akan bermuktamar ke-47 di kota Angin Mamiri Makassar 3-7 Agustus 2015, sementara NU akan menyelenggarakan muktamar ke-33 di kota kelahirannya Jombang 1-5 Agustus 2015.

Penyelenggaraan muktamar dua organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari ini rencananya akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, juga bersamaan dengan momentum kebangsaan memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-70. Tema yang diusung pun tidak lepas dari kata 'Indonesia'. Muhammadiyah mengusung tema 'Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan', sementara NU mengambil isu 'Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia'.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apa makna muktamar dua organisasi keagamaan yang merupakan *mainstream* paham keagamaan di Indonesia? Apa lagi diselenggarakan secara bersamaan?

Tentu, untuk menjawab pertanyaan di atas dapat diajukan beragam tesis bersandar pada perspektifnya masing-masing, termasuk perspektif komunikasi politik. Dalam perspektif komunikasi politik inti utamanya adalah *meaning* yakni pemaknaan yang ingin dikomunikasikan kepada publik baik melalui pesan verbal maupun nonverbal. Dalam konteks demikian, maka penyelenggaraan muktamar Muhammadiyah dan NU dapat diidentifikasi beberapa hal:

Pertama, politik momentum. Nampaknya, momentum peringatan Kemerdekaan RI ke-70 bulan Agustus dijadikan konstruksi realitas untuk meneguhkan jati diri komitmen kebangsaan kedua ormas. Meski Muktamar Muhammadiyah dimulai tanggal 3 Agustus, namun agenda muktamar Muhammadiyah diawali sidang tanwir yang dimulai tanggal 1 Agustus bersamaan dibukanya Muktamar NU.

Kedua, motif politik. Muktamar tidak hanya berdimensi ritual organisasi tetapi juga bentuk

M Nurul Yamin

komunikasi politik organisasi kepada publik. Sebagai bentuk komunikasi politik maka Muktamar tidak dapat dilepaskan motif, yakni daya dorong dan daya tarik. Daya dorong organisasi berupa kesadaran ideologis yang berbasis ajaran Ilahiah menjadi faktor utama kedua organisasi ini melakukan gerakan sosial dan menuntun eksistensinya sampai dewasa ini. Kesadaran yang bersifat internal ini menemukan momentumnya tatkala berhadapan dengan realitas sosial bangsa ini yang masih jauh dari harapan. Jadi, realitas sosial inilah yang menjadi daya tarik



sekaligus tantangan kebangsaan Muhammadiyah dan NU untuk mentransformasikan kesadaran ideologisnya menjadi kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi motif politik Muhammadiyah dan NU bukanlah politik yang berorientasi merebut kekuasaan, tetapi sebagaimana dikonstruksi oleh David Easton sebagai politik alokatif atau politik nilai.

Ketiga, *outward looking vs inward looking*. Kata 'berkemajuan' dalam tema Muktamar Muhammadiyah bersifat dinamis dan sangat kompetitif, serta menuntut *benchmark* sebagai tolok ukur di luar dirinya. Orientasi pada pandangan

dunia luar inilah yang ingin ditonjolkan Muhammadiyah di tengah kompetisi global yang tak terhindarkan. Sementara kata 'Islam Nusantara' yang diusung NU mencerminkan refleksi dan kesadaran yang mendalam atas realitas keislaman di Indonesia. Orientasi pada pandangan dunia dalam tentang keislaman Indonesia inilah yang ingin ditonjolkan NU sebagai identitas yang khas di tengah arus faham keagamaan impor dan trans internasional.

Keempat, demokrasi *civil society*. Penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah dan NU juga mencerminkan demokrasi *civil society*. Melalui muktamar inilah akan terjadi transisi kepemimpinan nasional kedua ormas. Dengan demikian kesuksesan Muktamar Muhammadiyah dan NU akan mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Kelima, kontestasi opini. Selama ini publik menilai bahwa meskipun kedua ormas ini memiliki banyak kesamaan, akan tetapi dalam beberapa hal menampakkan perbedaan bahkan cenderung berlawanan. Nuansa kontestasi ini pun akan terasa dalam pemberitaan dan opini muktamar melalui media massa. Dalam konteks demikian, media massa dituntut bukan saja profesional tetapi juga kedewasaannya berlaku adil dan proporsional dalam memberitakan kegiatan Muktamar Muhammadiyah maupun NU. Sebab penikmat media massa terbesar di negeri ini adalah warga Muhammadiyah dan NU, oleh karena itu bila media massa terjebak partisan akan merugikan media massa itu sendiri.

Kita berharap agar momentum Muktamar Muhammadiyah dan NU menghasilkan keputusan solutif untuk mengentaskan negeri ini dari keterpurukan. □ - k.

*) *Dr M Nurul Yamin, Dosen FAI dan Sekretaris Akademik Pascasarjana UMY.*